



Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited)

TA
2023

NERACA

LRA



LO

LPE



ACRUAL BASED

KANTOR PUSAT
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Lollan Panjaitan
NIP. 19710125 199703 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional.....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	8
A. Penjelasan Umum.....	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	51
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	61
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	65
VI. Lampiran dan Daftar.....	68



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 IG : @dplkemenhub151
JAKARTA – 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 FB : Ditjen Perhubungan Laut
EMAIL : djpl@dephub.go.id Twitter : @djplkemenhub151

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Unaudited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Lollan Panjaitan
NIP. 19710125 199703 1 001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 *Unaudited*.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp1,145,070,330,-** dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp0,-**. Hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya Bendahara Penerima pada satuan kerja Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sehingga mengakibatkan peralihan kelola PNBPN kepada Bendahara Penerima satuan kerja Direktorat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar **Rp388,215,482,660,-** atau mencapai **99** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp393,940,707,000,-**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 *Unaudited*.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 *Unaudited* dicatat dan disajikan sebesar **Rp2,315,596,589,009,-** yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar **Rp38,717,544,201,-**; Aset Tetap (netto) sebesar **Rp2,171,618,585,847,-**; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar **Rp0,-**; dan Aset Lainnya (neto)



sebesar Rp105,260,458,961,-.

Nilai Kewajiban sebesar Rp9,099,792,515,- sedangkan Nilai Ekuitas sebesar Rp2,306,496,796,494,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah sebesar Rp2,199,530,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp372,927,753,536,- sehingga terdapat Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(372,925,554,006). Surplus/ (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus/(Defisit) Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1,144,997,956,- dan sebesar Rp(371,780,556,050),- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(371,780,556,050),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp2,301,764,544,256,- dikurangi Surplus/ (Defisit)-LO sebesar Rp(371,780,556,050) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp20,597,100,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp376,492,211,188,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah senilai Rp2,306,496,796,494,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam



CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 *Unaudited* disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 *UNAUDITED*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Angg	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.145.070.330	100,00	580.360.758
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.145.070.330	100,00	580.360.758
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2.	104.099.644.000	103.299.684.804	99,23	107.334.969.890
Belanja Barang	B.3	274.495.085.000	269.590.099.811	98,21	235.287.315.292
Belanja Modal	B.4	15.345.978.000	15.325.698.045	99,87	11.599.688.528
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		393.940.707.000	388.215.482.660	98,55	354.221.973.710

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



II. NERACA

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 UNAUDITED DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	5.454.186.339	5.455.372.284
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(5.454.186.339)	(5.455.372.284)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	38.717.544.201	37.724.461.880
Jumlah Aset Lancar		38.717.544.201	37.724.461.880
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lain	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	1.769.309.588.000	1.769.309.588.000
Peralatan dan Mesin	C.16	178.876.185.224	168.241.779.974
Gedung dan Bangunan	C.17	55.134.174.522	58.250.140.522
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.18	96.324.731.780	96.324.731.780
Aset Tetap Lainnya	C.19	19.285.474.776	19.285.474.776
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	237.070.221.629	230.240.146.834
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(193.325.927.458)	(173.561.819.956)
Jumlah Aset Tetap		2.162.674.448.473	2.168.090.041.930
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.22	91.625.130.957	91.525.896.957
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.23	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.24	8.857.418.515	-
Aset Lain-Lain	C.25	11.669.833.027	11.669.833.027
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.26	(6.891.923.538)	(6.891.923.538)
Jumlah Aset Lainnya		105.260.458.961	96.303.806.446
JUMLAH ASET		2.306.652.451.635	2.302.118.310.256
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.27	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.28	9.099.792.515	353.766.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.29	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.30	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.099.792.515	353.766.000
JUMLAH KEWAJIBAN		9.099.792.515	353.766.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	2.297.552.659.120	2.301.764.544.256
JUMLAH EKUITAS		2.297.552.659.120	2.301.764.544.256
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.306.652.451.635	2.302.118.310.256

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 *UNAUDITED* (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.199.530	117.365.538
JUMLAH PENDAPATAN		2.199.530	117.365.538
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	103.188.292.804	107.273.284.890
Beban Persediaan	D.3	15.068.719.644	12.140.586.964
Beban Barang dan Jasa	D.4	116.016.296.806	106.604.023.682
Beban Pemeliharaan	D.5	10.026.481.746	8.774.389.863
Beban Perjalanan Dinas	D.6	119.547.682.098	102.381.297.648
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	18.022.427.520	18.595.976.118
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1.990.292	-
JUMLAH BEBAN		381.871.890.910	355.769.559.165
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(381.869.691.380)	(355.652.193.627)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		75.895.000	100.702.000
Surplus/ (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/ (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.069.102.956	362.575.410
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.144.997.956	463.277.410
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(380.724.693.424)	(355.188.916.217)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(380.724.693.424)	(355.188.916.217)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 UNAUDITED
DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	2.301.764.544.256	2.310.663.392.554
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(380.724.693.424)	(355.188.916.217)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	20.597.100	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	284.242.000
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	376.492.211.188	346.005.825.919
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(4.211.885.136)	(8.898.848.298)
EKUITAS AKHIR	E.5	2.297.552.659.120	2.301.764.544.256

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen dengan visi :

“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/ Negara yang berkualitas.”

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:



1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

**Basis
Akuntansi**

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas



diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-



aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan_LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO**

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai



berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%



Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan



mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.



**Penyusutan
Aset Tetap**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
<i>Peralatan dan Mesin</i>	<i>2 s.d. 20 tahun</i>
<i>Gedung dan Bangunan</i>	<i>10 s.d. 50 tahun</i>
<i>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	<i>5 s.d 40 tahun</i>
<i>Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)</i>	<i>4 tahun</i>

**Piutang
Jangka
Panjang**

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas



dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa



masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Periode berjalan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak enam kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar **Rp358.023.994.000,-** setelah revisi terakhir menjadi sebesar **Rp364.429.703.000,-**. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	94.636.527.000	104.099.644.000
Belanja Barang	257.489.464.000	274.495.085.000
Belanja Modal	5.898.003.000	15.345.978.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	358.023.994.000	393.940.707.000

Revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp9.463.117.000,-. Penambahan pagu belanja barang sebesar Rp17.005.621.000,-. Penambahan belanja modal sebesar Rp9.447.975.000,-.

Realisasi

Pendapatan

Rp1,145,070,330,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1,145,070,330,-** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp0,-**.

Pendapatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan



realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	75.895.000,00	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	2.199.530	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	29.049.800	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.037.926.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	-
Jumlah	-	1.145.070.330	-

*TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	75.895.000	-	100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	100.702.000	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	2.199.530	112.333.338	(98,04)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	5.032.200	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	29.049.800	1.670.240	1.639,26
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.037.926.000	360.622.980	187,81
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	1.145.070.330	580.360.758	97,30

*TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi

Belanja

Negara

Rp388,215,4

82,660,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada TA 2023 adalah sebesar **Rp388,215,482,660,-** atau **99** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp393,940,707,000,-**. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :



Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	104.099.644.000	103.336.435.971	99,27
Belanja Barang	274.495.085.000	269.621.441.425	98,22
Belanja Modal	15.345.978.000	15.325.698.045	99,87
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	393.940.707.000	388.283.575.441	98,56
Pengembalian	-	(68.092.781)	-
Jumlah	393.940.707.000	388.215.482.660	98,55

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 9.6 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Peningkatan belanja modal untuk mendukung rencana strategis pada TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	103.336.435.971	107.351.496.753	(3,74)
Belanja Barang	269.621.441.425	235.486.210.292	14,50
Belanja Modal	15.325.698.045	11.411.375.528	34,30
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Pengembalian Belanja	(68.092.781)	(27.108.863)	151,18
Jumlah	388.215.482.660	354.221.973.710	9,60

Belanja
Pegawai
Rp103,299,6
84,804,-

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp103,299,684,804,- dan Rp107,334,969,890,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan



dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar (3.76) persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan yang signifikan pada Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Lembur dan Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	54.038.851.681	56.387.332.052	(4,16)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	93.176.987	-	-
Belanja Uang Lembur	493.448.000	503.241.000	(1,95)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	48.710.959.303	50.460.923.701	(3,47)
Jumlah Belanja Kotor	103.336.435.971	107.351.496.753	(3,74)
Pengembalian Belanja Pegawai	(36.751.167)	(16.526.863)	122,37
Jumlah Belanja	103.299.684.804	107.334.969.890	(3,76)

Belanja

Barang

Rp269,590,0

99,811,-

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp269,590,099,811,- dan Rp235,475,628,292,- Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 14.49 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang non operasional, belanja jasa, barang persediaan, belanja jasa dan belanja perjalanan dalam negeri sepanjang TA 2023.

Refocussing dan Realokasi anggaran terhadap penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 dilaksanakan pada pengalokasian pagu alokasi anggaran senilai Rp99,992,000,- sebagai efisiensi dana untuk belanja penanganan COVID-19 yang dibebankan pada mata akun belanja barang diantaranya adalah :



a. Belanja Barang Operasional–Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini dari segi *refocussing* dan realokasi anggaran juga dilakukan alokasi pagu anggaran yang dikodefikasikan pada mata akun belanja 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi. Pada penerapannya pagu alokasi anggaran yang dianggarkan untuk belanja 521131 adalah senilai Rp99,992,000,- yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan pegawai dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi. Sampai dengan akhir bulan Juli 2023 sudah dilakukan realisasi terhadap belanja tersebut.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022



URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	11.676.540.399	13.595.977.217	(14,12)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	578.809.836	680.620.687	(14,96)
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat		170.322.000	(100,00)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.238.560.000	1.103.990.000	12,19
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	99.720.000	4.725.881.113	-
Belanja Barang Operasional Lainnya	12.810.000	312.500.000	-
Belanja Bahan	9.597.025.214	9.690.594.690	-
Belanja Honor Output Kegiatan			-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15.302.029.161	14.799.401.720	-
Belanja Barang Non Operasional kepada BLU dalam satu Kementerian Lembaga	4.605.480.000	2.771.908.000	
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		364.273.993	
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		6.882.222	
Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust	503.852.272	467.614.590	
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23.999.902.565	17.672.498.524	35,80
Belanja Langganan Listrik	152.409.325	106.016.028	43,76
Belanja Langganan Telepon	463.489.749	461.879.293	0,35
Belanja Langganan Air	18.180.163		
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	149.850.000	149.850.000	-
Belanja Jasa Konsultansi	32.426.244.863	30.526.288.024	-
Belanja Sewa	11.094.494.518	13.108.768.525	(15,37)
Belanja Jasa Profesi	986.700.000	1.188.500.000	-
Belanja Jasa kepada BLU dalam satu Kementerian			-
Belanja Jasa Lainnya	27.125.829.715	12.469.154.390	-
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.480.646.393	4.912.000.625	31,93
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.545.708.813	3.809.409.003	(6,92)
Belanja Pemeliharaan Lainnya			-
Belanja perjalanan biasa	31.388.591.679	27.489.886.000	14,18
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.226.591.000	66.579.379.000	14,49
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.712.027.000	2.754.358.648	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19			
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.882.661.760	3.334.562.000	-
Belanja perjalanan biasa - luar negeri	6.353.287.000	2.233.694.000	-
Total Belanja	269.621.441.425	235.486.210.292	14,50
Pengembalian Belanja	(31.341.614)	(10.582.000)	-
Jumlah Belanja	269.590.099.811	235.475.628.292	14,49

Belanja

Modal

Rp15,325,69

8,045,-

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15,325,698,045,- dan Rp11,411,375,528,-. Belanja modal merupakan



pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 34.30 persen dibandingkan TA 2022.

Hal ini disebabkan karena adanya penurunan yang signifikan pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Lainnya serta realisasi Belanja Modal Jaringan pada Tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah			-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.846.389.250	7.834.276.528	-38,14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi			-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.929.308.795	3.577.099.000	0,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan			0,00
Belanja Modal Lainnya	3.550.000.000		0,00
Jumlah Belanja Kotor	15.325.698.045	11.411.375.528	34,30
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	15.325.698.045	11.411.375.528	34,30

Belanja

Modal Tanah

Rp0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
NIHIL	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja

Modal

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode



Peralatan
dan Mesin
Rp4,846,389,
250,-

yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah sebesar Rp4,846,389,250,- sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp7,834,276,528,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022*

NO	URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Elevator/Lift	832.966.200	-	-
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	462.900.000	503.100.000	-7,99
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	191.500.000	-	-
4	Teropong Bintang Transit	6.648.900	-	-
5	Lemari Besi / Metal	-	7.787.760	-100,00
6	Lemari Kayu	122.138.850	254.800.500	-52,06
7	Rak Besi	1.441.000.000	199.134.000	623,63
8	Filing Cabinet Besi	-	17.748.900	-100,00
9	Lemari Display	128.947.590	-	-
10	Mesin Absensi	168.220.500	-	-
11	CCTV - Camera Control Television System	16.938.600	42.846.000	-60,47
12	Alat Penghancur Kertas	-	24.726.360	-100,00
13	Lap Top	-	2.200.000.000	-100,00
14	P.C Unit	-	1.533.000.000	-100,00
15	Tablet PC	25.663.200	-	-
16	LCD Proyektor/Infocus	99.012.000	167.432.400	-40,86
17	Focusing Screen/ Layar LCD Projector	13.431.000	14.607.600	-8,05
18	Meja Kerja Kayu	130.107.540	229.225.323	-43,24
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	309.330.000	-100,00
20	Air Cleaner	-	26.085.000	-100,00
21	Lemari Es	7.067.370	37.458.393	-81,13
22	Dispenser	16.970.235	21.331.980	-20,45
23	Drone	106.000.000	-	-
24	Camera Conference	297.211.600	38.538.090	671,22
27	Kursi Besi/Metal	89.684.670	745.636.506	-87,97
28	Kursi Kayu	9.550.440	17.049.600	-43,98
29	Sice	20.680.410	43.512.000	-52,47
30	Meja Rapat	26.571.180	270.928.800	-90,19
31	Meja Komputer	-	4.809.852	-100,00



32	Kasur/ Spring Bed	72.427.500	137.184.900	-47,20
33	Meja Makan Kayu	6.288.150	16.927.500	-62,85
34	Nakas	9.990.000	4.662.000	114,29
35	Meja Taman	4.384.500	-	-
36	Sofa	7.603.500	-	-
37	Mesin Cuci	-	36.519.000	-100,00
38	A.C. Split	110.977.800	94.627.500	17,28
39	Kompor Listrik (Alat Dapur)	-	12.580.740	-100,00
40	Rice Cooker (Alat Dapur)	-	2.786.100	-100,00
41	Oven Listrik	-	18.448.200	-100,00
42	Kitchen Set	128.475.840	50.671.500	153,55
43	Blender	-	2.719.500	-100,00
44	Alat Dapur Lainnya	-	2.763.900	-100,00
45	Televisi	191.189.730	283.338.600	-32,52
46	Coffee Maker	23.134.620	-	-
47	Wireless	-	4.781.880	-100,00
48	Microphone	-	8.085.240	-100,00
49	Kabel	-	4.706.844	-100,00
50	Bracket Standing Peralatan	6.035.625	15.462.300	-60,97
51	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	-	15.584.400	-100,00
52	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	-	17.094.000	-100,00
53	Tensimeter	-	50.744.760	-100,00
54	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	-	14.737.470	-100,00
55	Instrumen Cabinet	-	18.747.900	-100,00
56	Temperatur Monitor	-	6.927.510	-100,00
57	Alat Kedokteran Umum Lainnya	-	50.107.620	-100,00
58	Dental Hand Instruments Set	-	26.151.600	-100,00
59	Boor Gigi	-	6.315.900	-100,00
60	Cirto Jec	-	31.324.200	-100,00
61	Tang Set	-	13.013.640	-100,00
62	Bein	-	38.041.920	-100,00
63	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	-	54.499.890	-100,00
64	Alat Kedokteran Lainnya	72.671.700	-	-
65	Stabilizer	-	19.696.950	-100,00
65	Air Conditioning (AC)	-	65.934.000	-100,00
	Jumlah Belanja Kotor	4.846.389.250	7.834.276.528	7,18
	Pengembalian	-	-	-
	Jumlah Belanja	4.846.389.250	7.834.276.528	7,18



Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp6,929,308,
795,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,929,308,795,- dan Rp3,577,099,000,-. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 bila dibandingkan pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak ada realisasi belanja.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.929.308.795	3.577.099.000	194
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	6.929.308.795	3.577.099.000	194

Belanja
Modal Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan
Rp0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mengalami kenaikan dan juga penurunan atau tidak terjadi realisasi sama sekali pada Tahun Anggaran 2022 dan 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-



Belanja
Modal
Lainnya
Rp3,550,000,
000,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,550,000,000,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 berasal dari kesalahan akun atas belanja *server* dan *storage* pada saat penetapan pagu sampai dengan pertanggungjawabannya, seharusnya belanja tersebut dibebankan pada akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	3.550.000.000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.550.000.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	3.550.000.000	-	-

Belanja
Bantuan
Sosial
Rp0,-

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
NIHIL	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023
Unaudited dan 2022*

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023
Unaudited dan 2022*



Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

**Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,-**

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 Unaudited dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

**Piutang PNB
Rp5,454,820,329,-**

C.4. Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5,454,186,339,- dan Rp5,455,372,284,-. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah



diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Piutang PNBP TA 2023 Unaudited dan 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang PNBP	5.454.186.339	5.455.372.284
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	5.454.186.339	5.455.372.284

Untuk Rinciannya adalah sebagai berikut :

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang dari Jasa Transportasi Laut kepada PT. PELNI (Persero)	5.454.186.339	-
Piutang dari Jasa Transportasi Laut kepada PT. PELNI (Persero)	-	5.455.372.284
Jumlah	5.454.186.339	5.455.372.284

(terlampir)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-

**C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 Unaudited dan
2022*

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	NIHIL	-	-
2		-	-
	Jumlah	-	-



**Bagian Lancar
TPA Rp0,-**

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2023 Unaudited dan
2022*

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	NIHIL	-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

**Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-Piutang
Bukan Pajak
Rp(5,454,186,33
9),-**

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp(5,454,186,339),- dan Rp(5,455,372,284),-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :



*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Bukan Pajak TA 2023 Unaudited dan 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	5,00%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	5.454.186.339	100%	5.454.186.339
Jumlah	5.454.186.339		5.454.186.339
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	5,00%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	5,00%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.454.186.339		5.454.186.339

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0,-*

C.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2023 Unaudited
dan 2022*

Nama	TH 2023	TH 2022
NIHIL	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



**Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-**

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2023 Unaudited dan 2022

Nama	TH 2023	TH 2022
NIHIL	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

**Persediaan
Rp38,717,544,2
01,-**

C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp38,717,544,201,- dan Rp37,724,461,880,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 Unaudited dan 2022



Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	38.717.544.201	37.724.461.880
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	38.717.544.201	37.724.461.880

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Persediaan yg
Belum Diregister
Rp0,-

C.10.1 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah sebagai berikut :



*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA per 31
Desember 2023 Unaudited dan 2022*

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	NIHIL	-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan

Penjualan

Angsuran

Rp0,-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 *audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA per 31 Desember 2023
Unaudited dan 31 Desember 2022 audited*

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	NIHIL	-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Piutang Jangka

Panjang Lainnya

Rp0,-

C.13. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 *audited* adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :



Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya

Uraian	TH 2022	TH 2021
NIHIL		
Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp0,-

C.14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Panjang Lainnya untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Jangka Panjang Lainnya			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-



Tanah

Rp1.769.309.588.000,-

8.000,-

C.15. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1,769,309,588,000,- dan Rp1,769,309,588,000,-. Tidak terdapat perubahan nilai aset tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.769.309.588.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	1.769.309.588.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023 *Unaudited*

URAIAN	KUANTITAS	Nilai
Tanah Gol I	5.348	Rp 54.560.642.000
Tanah Gol II	83.720	Rp 1.006.289.684.000
Tanah Bangunan Mess	5.238	Rp 9.106.557.000
Tanah Bangunan Kantor	10.020	Rp 631.733.646.000
Tanah tanpa golongan	6.534	Rp 67.619.059.000
Jumlah		Rp 1.769.309.588.000

Peralatan dan

Mesin

Rp178,876,185,224,-

224,-

C.16. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah Rp178,876,185,224,- dan Rp168,241,779,974,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp168.241.779.974
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp8.396.389.250
Transfer Masuk	Rp2.238.016.000
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	
Transfer Keluar	
Saldo per 31 Desember 2023	Rp178.876.185.224
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp149.556.997.856
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp29.319.187.368

- a. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Kemenhub berupa Kendaraan Dinas senilai Rp1.921.016.000,00;
- b. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari KSOP Sunda Kelapa berupa Kendaraan Dinas senilai Rp317.000.000,00.

Gedung dan

Bangunan

Rp55,134,174,5

22,-

C.17. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah Rp55,134,174,522,- dan Rp58,250,140,522,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	58.250.140.522
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	3.115.966.000
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	55.134.174.522
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2023	20.412.105.963
Nilai Buku per 31 Desember 2023	34.722.068.559



Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp96,324,731,7
80,-

C.18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp96,324,731,780,- dan Rp96,324,731,780,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	96.324.731.780
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	96.324.731.780
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2023	23.356.823.639
Nilai Buku per 31 Desember 2023	72.967.908.141

Aset Tetap
Lainnya
Rp19,285,474,7
76,-

C.19. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah Rp19,285,474,776,- dan Rp19,285,474,776,-.

Mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023 *Unaudited*, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	19.285.474.776
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	19.285.474.776
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	19.285.474.776



Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp237,070,221,
629,-

C.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp237,070,221,629,- dan Rp230,240,146,834,-. Terdapat perubahan nilai pada Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	230.240.146.834
Mutasi tambah:	-
Perolehan/Penambahan KDP	6.830.074.795
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	237.070.221.629
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	237.070.221.629

Rincian saldo KDP per 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah sebagai berikut :

No	Asal Perolehan	Nilai (Rp)
1	Satker Pulau Terluar	230.240.146.834
2	Pembangunan Pagar Keliling Rumah Dinas Jabatan Es. I dan Es. II	6.830.074.795
	JUMLAH	237.070.221.629

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(193,325,927,
458)-

C.21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(193,325,927,458)- dan Rp(173,561,819,956)-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi



dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni
TA 2023 Unaudited*

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	178.876.185.224	149.556.997.856	29.319.187.368
2	Gedung dan Bangunan	55.134.174.522	20.412.105.963	34.722.068.559
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	96.324.731.780	23.356.823.639	72.967.908.141
4	Aset Tetap Lainnya	19.285.474.776		19.285.474.776
Total		349.620.566.302	193.325.927.458	156.294.638.844

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

Berwujud

Rp91,625,130,9

57,-

C.22. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah Rp91,625,130,957,- dan Rp91,525,896,957,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa Software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	91.525.896.957
Mutasi tambah:	-
Pembelian	99.234.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	91.625.130.957
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	3.391.404.282
Nilai Buku per 31 Desember 2023	88.233.726.675



Aset Tak
Berwujud Dalam
Pengerjaan
Rp0,-

C.23. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp8,857,418,515,-

C.24. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah Rp8,857,418,515,- dan Rp0,-. Dana yang merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Aset Lain-Lain
Rp11,669,833,027,-

C.25. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah Rp11,669,833,027,- dan Rp11,669,833,027,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lain-lain ini merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	11.669.833.027
Mutasi tambah	
Mutasi kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	11.669.833.027
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(3.500.519.256)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	8.169.313.771



Sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan Nomor 39/BP/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 hal Permohonan Usulan Penghapusan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Bagian Perencanaan, bahwa Pekerjaan Survey Investigasi Desain (SID) Dermaga Kapal Patroli (10 Pkt) diusulkan untuk dihapuskan karena dokumen SID tersebut dalam kondisi hancur akibat dari kebakaran. Berikut adalah rincian Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan:

No	Asal Perolehan	Nilai (Rp)
1	SID Cikoneng	731.401.000
2	SID Tanjung	759.038.500
3	SID Sampit Kota Waringin, Kalteng	762.572.250
4	SID Bau Bau, Sulawesi Tenggara	740.404.500
5	SID Bansering, Banyuwangi, Jatim	415.211.500
6	SID Waisai	773.245.000
7	SID Merauke	779.509.500
8	SID Teluk Bayur	754.996.000
9	SID Wonreli	777.711.000
10	SID Balikpapan	766.799.000
	JUMLAH	7.260.888.250



Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp6,891,923,538,-)

C.26 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp6,891,923,538,-) dan (Rp6,891,923,538,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud Lainnya	88.233.726.675	-	88.233.726.675
Software	3.391.404.282	3.391.404.282	-
Jumlah	91.625.130.957	3.391.404.282	88.233.726.675
Aset Lain-lain	11.669.833.027	3.500.519.256	8.169.313.771
Jumlah	103.294.963.984	6.891.923.538	96.403.040.446

Uang Muka dari
KPPN Rp0,-

C.27. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 *audited* masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp9,099,792,515,-

C.28. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp9,099,792,515,- dan Rp353,766,000,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada



pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga tersebut berupa SPP (Surat Perintah Pembayaran) atas tagihan yang masih dalam proses pertanggungjawaban untuk menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pendapatan
Diterima
di Muka
Rp0,-

C.29. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
NIHIL	-
	-
	-
Total	-

Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp9,099,792,51
5,-

C.30 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9,099,792,515,- dan Rp353,766,000,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2023 Unaudited dan 2022*



Uraian	TH 2023	TH 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	242.374.000	353.766.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	8.857.418.515	-
Jumlah	9.099.792.515	353.766.000

Ekuitas

Rp2,297,552,659,

120,-

C.31. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,297,552,659,120,- dan Rp2,301,764,544,256,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBF

Rp2,199,530,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebesar Rp2,199,530,- dan Rp116,217,838,-.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 Unaudited dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	2.199.530	116.217.838	(98,11)
Jumlah	2.199.530	116.217.838	(98,11)

Beban

Pegawai

Rp103,188,292,

804,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp103,188,292,804,- dan Rp107,273,284,890,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 Unaudited dan 2022



URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	40.283.499.090	41.677.332.400	(3,34)
Beban Pembulatan Gaji PNS	600.002	725.148.000	(17,26)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	2.966.488.945	3.115.712.520	(4,79)
Beban Tunjangan Anak	853.231.711	892.281.884	(4,38)
Beban Tunjangan Struktural PNS	1.068.375.000	1.275.440.000	(16,23)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	467.260.000	154.415.000	202,60
Beban Tunjangan PPh PNS	69.210.083	65.403.980	5,82
Beban Tunjangan Beras PNS	2.358.538.350	2.461.266.120	(4,17)
Beban Uang Makan PNS	3.954.439.000	4.745.265.000	(16,67)
Beban Tunj Kompensasi Kerja PNS	-	-	-
Beban Tunj Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	1.905.817.500	1.937.805.000	(1,65)
Beban Gaji Pokok PPPK	68.734.400	-	100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.055	-	100
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.117.760	-	100
Beban Tunjangan Anak PPPK	423.552	-	100
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8.928.000	-	100
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.969.220	-	100
Beban Uang Makan PPPK	10.003.000	-	100
Beban Uang Lembur	493.448.000	503.241.000	(1,95)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	48.693.407.303	50.460.923.701	(3,50)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	17.552.000	-	100
Pengembalian Beban Pegawai	(36.751.167)	(16.526.863)	122,37
Jumlah	103.188.292.804	107.273.284.890	(3,81)

Beban

Persediaan

Rp15,068,71

9,644,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar



Rp15,068,719,644,- dan Rp12,140,586,964,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 Unaudited dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	15.068.719.644	12.140.586.964	24,12
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	15.068.719.644	12.140.586.964	24,12



Beban

Barang dan

Jasa

Rp116,016,296

,806,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp116,016,296,806,- dan Rp106,604,023,682,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 Unaudited dan 2022



URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	11.676.540.399	13.595.977.217	(14,12)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	578.809.836	680.620.687	(14,96)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	170.322.000	(100)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.238.560.000	1.103.990.000	12,19
Beban Barang Operasional Lainnya	12.810.000	312.500.000	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	99.720.000	4.725.881.113	(97,89)
Beban Bahan	9.597.025.214	9.690.594.690	(0,97)
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15.302.029.161	14.799.401.720	3,40
Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	4.605.480.000	2.771.908.000	66,15
Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	-	364.273.993	(100,00)
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	503.989.136	467.896.780	-
Beban Langganan Listrik	152.409.325	106.016.028	43,76
Beban Langganan Telepon	463.489.749	461.879.293	0,35
Beban Langganan Air	18.180.163	-	100
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	149.850.000	149.850.000	-
Beban Jasa Konsultan	32.426.244.863	30.429.607.024	6,56
Beban Sewa	11.094.494.518	13.108.768.525	(15,37)
Beban Jasa Profesi	986.700.000	1.188.500.000	(16,98)
Beban Jasa Lainnya	27.125.829.715	12.469.154.390	117,54
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	6.882.222	(100)
Pengembalian Beban Barang dan Jasa	(15.865.273)	-	-
Jumlah	116.016.296.806	106.604.023.682	8,83

Beban
Pemeliharaan
Rp10,026,48
1,746,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10,026,481,746,- dan Rp8,774,389,863,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan



untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 Unaudited dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.480.646.393	4.912.000.625	31,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.545.708.813	3.809.409.003	(6,92)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	126.540	52.980.235	(99,76)
Jumlah	10.026.481.746	8.774.389.863	14,27

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp119,547,682,

098,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp119,547,682,098,- dan Rp102,381,297,648,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 Unaudited dan 2022



URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	31.388.591.679	27.489.886.000	14,18
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.226.591.000	66.579.379.000	14,49
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.712.027.000	2.754.358.648	- 1,54
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19			-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.882.661.760	3.334.562.000	- 13,55
Beban Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	6.353.287.000	2.233.694.000	184,43
Pengembalian beban perjalanan dinas	- 15.476.341	- 10.582.000	-
Jumlah	119.547.682.098	102.381.297.648	16,77

Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2023 Unaudited dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban
Bantuan

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 *Unaudited* dan



Sosial Rp0,-

2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 Unaudited dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
NIHIL	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban

Penyusutan

dan

Amortisasi

Rp18,022,427,

520,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18,022,427,520 dan Rp18,595,976,118,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 Unaudited dan 2022



URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.939.326.698	13.515.202.657	(4,26)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.132.480.916	3.130.153.555	0,07
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.950.619.906	1.950.619.906	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	18.022.427.520	18.595.976.118	(3,08)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp1.990.292,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.990.292,- dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 Unaudited dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	1.990.292	-	0,00
Jumlah	1.990.292	-	0,00

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp1,144,997,956,-

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 Unaudited dan 2022



URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %)
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	75.895.000	100.702.000	-
Surplus/ (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.069.102.956	362.575.410	194,86
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.144.997.956	463.277.410	147,15

Pos Luar

Biasa Rp0,-

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 Unaudited dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
NIHIL	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp2,301,764,

544,256,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,301,764,544,256,- dan Rp2,310,663,392,554,-.

Surplus/ (Defisit) LO

Rp(380,724,69

3,424),-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebesar Rp(380,724,693,424),- dan Rp(355,188,916,217),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp20,597,10

0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20,597,100,- dan Rp0,-.



Selisih

Revaluasi

Aset Tetap

Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp0,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	NIHIL
Jumlah	

Koreksi Lain-

Lain Rp0,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Transaksi

Antar Entitas

Rp376,492,21

1,188,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp376,492,211,188,- dan Rp346,005,825,919,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang



berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	388.215.482.660
Diterima dari Entitas Lain	(1.145.070.330)
Transfer Keluar	(10.739.954.286)
Transfer Masuk	161.753.144
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Setoran Surplus BLU	-
Jumlah	376.492.211.188

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023 *Unaudited*, DDEL sebesar Rp(1.145.070.330),- sedangkan DKEL sebesar Rp388.215.482.660,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 *Unaudited* sebesar Rp161.753.144,- merupakan barang konsumsi antar anak satuan kerja. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember



2023 *Unaudited* sebesar Rp(10.739.954.286),- terdiri dari :

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
1	Barang Konsumsi	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	38.717.544.201
Jumlah			38.717.544.201

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 *Unaudited* sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang Tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 *Unaudited* adalah Rp0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL		-
2			-
Total Pengesahan			-
			-
Jumlah			-

Ekuitas

Akhir

Rp2,297,552,

659,120,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 *Unaudited* dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,297,552,659,120,- dan Rp2,301,764,544,256,-.



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut telah melakukan koreksi pencatatan terhadap piutang PNBPT PT. ASDP (Persero) pada Laporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.102/40/11 PHB 2019 Perihal Koreksi Pencatatan Piutang PNBPT terhadap PT ASDP (Persero) dan perusahaan penyeberangan swasta lainnya, yang menyebutkan bahwa :
 - a) Piutang PNBPT PT ASDP (Persero) dan perusahaan penyeberangan swasta lainnya sebesar **Rp17.856.195.215,00** dan **USD391.09** merupakan piutang PNBPT berdasarkan tagihan jasa rambu dan jasa kepelabuhanan untuk kapal perintis periode Tahun 2000-2009;
 - b) Piutang yang berasal dari jasa rambu untuk kapal penyeberangan tersebut di atas jenis dan tarifnya tidak secara nyata diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, dan perjanjian/kesepakatan terkait besaran tarif dan jenis PNBPT tersebut juga tidak ada;
 - c) Pungutan yang dilakukan atas jasa rambu bagi kapal-kapal penyeberangan tidak memiliki dasar hukum karena tidak tercantum baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri sehingga tidak dapat dilakukan pungutan atas jasa rambu terhadap kegiatan oleh kapal-kapal penyeberangan;
 - d) Piutang PNBPT sebagaimana dimaksud di atas juga tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian piutang oleh Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Lain-Lain karena tidak ada dasar hukum yang terkait sebab timbulnya piutang.
 - e) Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut telah menindaklanjuti koreksi pencatatan piutang sebesar **Rp17.856.195.215,00** dengan rincian sebagai berikut :
 - PT ASDP (Persero) sebesar **Rp8.087.348.955,00** dan



USD391.09

- PT Jembatan Madura sebesar
Rp6.291.019.260,00
- PT Putra Master SP sebesar Rp1.252.694.800,00
- PT Jemla Ferry sebesar Rp735.171.360,00
- PT Dharma Lautan Utama sebesar
Rp592.718.400,00
- PT Gerbang Samudera S. sebesar
Rp541.480.800,00
- PT Juli Rahayu sebesar Rp178.384.440,00
- PT Bukaka Lintas Tama sebesar
Rp177.377.200,00

2. Terdapat penyisihan piutang tak tertagih atas piutang PT. PELNI (Persero) senilai Rp5.454.186.339,-. Menindaklanjuti surat LHA Itjen Kemenhub pada 4 Agustus 2017 lalu hingga saat ini dari PT. PELNI (Persero) belum melakukan pembayaran atas piutang tersebut, atas dasar ini Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut melakukan perubahan klasifikasi piutang dari sebelumnya lancar menjadi macet. Sehingga terhadap piutang tersebut dilakukan penyisihan sebesar 100% dari nilai piutang setelah dikurangkan dengan nilai agunan atau senilai piutang yang belum dibayarkan yaitu Rp5.454.186.339,-.
3. Terdapat transaksi resipokal antara satker Kantor Pusat Ditjen Hubla (412772) senilai Rp6,615,122,258,-. Transaksi tersebut berasal dari belanja resipokal dengan satker BLU Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, BLU Balai Diklat Transportasi Laut, dan BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
4. Terdapat ketidaksesuaian akun atas belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D
1	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Ditjen Hubla	8010101999	1	99.234.000	99.234.000	231331701003991
2	536111	Belanja Modal Lainnya	Pengadaan Server dan Storage Ditjen Hubla	3100204001	2	1.775.000.000	3.550.000.000	231331301053075

Terhadap ketidaksesuaian akun tersebut sempat dilakukan tindak lanjut dari Bagian Keuangan cq. Substansi Anggaran pada periode Januari lalu dengan melakukan pengajuan revisi anggaran atas ketersediaan dana untuk akun



tersebut namun ketika pengajuan revisi anggaran terkena validasi sistem dengan keterangan pagu dana tidak tersedia atau sebagian dana terkena blokir.

Atas kendala tersebut Bagian Keuangan belum dapat melanjutkan proses revisi anggaran dan koreksi SPM, sehingga *to do list* Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN tersebut masih tetap ada di periode Tahunan 2023.

5. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan efisiensi anggaran untuk dialokasikan pada belanja dalam rangka *refocussing* terhadap penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Adapun belanja yang dialokasikan dalam rangka penanganan COVID-19 ini diantaranya adalah :

a. Belanja Barang Operasional–Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini dari segi *refocussing* dan realokasi anggaran juga dilakukan alokasi pagu anggaran yang dikodefikasikan pada mata akun belanja 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi. Pada penerapannya pagu alokasi anggaran yang dianggarkan untuk belanja 521131 adalah senilai Rp99,992,000,- yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan pegawai dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi. Sampai dengan akhir bulan Juli 2023 sudah dilakukan realisasi terhadap belanja tersebut.

No.	Kode Akun	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	99.992.000	99.720.000	99,73%